



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Informasi kepada masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan amanat konstitusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini merupakan tahun keempat kepemimpinan saya selaku Gubernur Kalimantan Timur bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak H.M. Mukmin Faisyal HP periode Tahun 2013 – 2018, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan LPPD ini. Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan PetunjukNya kepada Kita semua Terima kasih. Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat .
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan EKPPD .
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/321/SJ Tgl 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 12.726.752 Ha dengan luas wilayah daratan 12.533.681 Ha, dibagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) Kota, 103 Kecamatan dan 1.026 Desa/Kelurahan. Penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3.505.161 jiwa (Data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2017). Berdasarkan



komposisi rasio jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 52% atau 1.828.752 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 48% atau 1.676.409 jiwa.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013-2018

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2013-2018 sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”

b. MISI

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.
- 3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dengan memuat kebijakan pembangunan maupun kebijakan APBD yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan jabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan Program Pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2017.

Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD 2017 ditetapkan dengan tema :

：“ PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS”.



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, sebagai berikut:

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan :

a. Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI pada tahun 2016 capaian kinerja 96,11 %.
2. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 capaian kinerja 94,98 %.
3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian kinerja 94,98 %.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2017 capaian kinerja 94,44 %.
5. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian kinerja 98,17 %.
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian kinerja 0,03 %.
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian kinerja 96,77 %.
8. Pembinaan Guru Jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 96,10 % .
9. Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 95,98 %.
10. Pembinaan Guru Jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 96,96 %.
11. Tersedia Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan yang ditangani pada 9 Kabupaten/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian kinerja 91,85 %.
2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan capaian kinerja 89,85 %
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan capaian kinerja 84,68 %.
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sesuai standar dengan capaian kinerja 100 %.
5. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan capaian kinerja 70,24 %.
6. Cakupan Penemuan penanganan penderita penyakit DBD dengan capaian kinerja 100 %.
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan capaian kinerja 83,92 %.
8. Cakupan kunjungan bayi dengan capaian kinerja 91,22 %.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang ditangani pada 9 Kabupaten/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Pemantauan Pencemaran Udara dengan capaian kinerja 100 % terhadap 9 kabupaten/kota se Kaltim.
2. Kebersihan dengan capaian kinerja 80,42 %.



3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan capaian kinerja 2,74 %.
4. Penegakkan Hukum Lingkungan dengan capaian kinerja 84,54 %.

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prosentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2017 dengan capaian kinerja 73,55 %.
2. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 76,52 %.
3. Prosentase Kawasan Kumuh yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 0,50 %.
4. Prosentase Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 14,93 %.

e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan yang ditangani pada 9 Kabupaten/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan capaian kinerja 82,06 %.
2. Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 79,08 %.

h. Urusan Kepemudaan & Olahraga

Urusan Kepemudaan Olahraga yang ditangani pada 9 Kabupaten/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta) dengan capaian kinerja 0,04 %.
2. Lapangan Olahraga dengan capaian kinerja 1,10 %

i. Urusan Penanaman Modal

Nilai realisasi PMDN tahun 2017 dibanding realisasi PMDN tahun 2016 dengan capaian 59,48 %, capaian Tahun 2016 minus 28,36 %.

j. Urusan Koperasi dan UMKM

Urusan Koperasi dan UMKM yang ditangani pada 9 Kabupaten/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian kinerja 69,20 %.
2. Usaha Mikro dan Kecil dengan capaian kinerja 83,87 %.

k. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya data base kependudukan skala Provinsi yang dibuat 1 Tahun 2 kali dengan skalaper semester.

l. Urusan Ketenagakerjaan

1. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dengan capaian kinerja 79,12 %.
2. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dengan capaian kinerja 49,07 %.

m. Urusan Ketahanan Pangan

1. Telah dibuat regulasi ketahanan pangan .
2. Ketersediaan pangan utama yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 148.760,84 kg.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dengan capaian kinerja 38,00 %.
2. Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan capaian kinerja 25,60 %.

o. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Prevalensi peserta KB aktif dengan capaian kinerja 68,71 %.



2. Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan dengan capaian kinerja 2,11 %

p. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 untuk angkutan darat dengan capaian kinerja 50,05 %.

q. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Tersedianya website milik pemerintah daerah .
2. Jumlah Pameran/Expo selama tahun 2017 sebanyak 29 kali.

r. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 untuk luas lahan bersertifikat dengan capaian kinerja 20,71 %.

s. Urusan Trantibumlinmas

1. Kegiatan pembinaan politik daerah mencapai 6 kegiatan.
2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mencapai 8 kegiatan.

t. Urusan Fungsi Penunjang

Urusan Fungsi Penunjang selama tahun 2017, sebagai berikut :

1. Tersedianya 12 Sistem Informasi Manajemen Pemda.
2. Memiliki 20 kasus Tapal Batas.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD.
4. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD.
5. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD.
6. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD pada tahun 2017 dengan capaian kinerja 99,28 %.

u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 untuk jumlah PKK aktif dengan capaian kinerja 97,37 %.

v. Urusan Sosial

1. Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) sebanyak 126 panti.
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dengan capaian kinerja 34,90 %.

w. Urusan Budaya

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 87 kali.
2. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berjumlah 5 buah.

x. Urusan Statistik

Tersedianya buku "Provinsi dalam Angka" dan buku "PDRB Provinsi"

y. Urusan Kearsipan

1. Penerapan pengelolaan arsip secara baku dengan capaian kinerja 100 %.
2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan.

z. Urusan Perpustakaan

1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan capaian kinerja 39,61 %.
2. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 (satu) tahun dengan capaian kinerja 13,47 Orang.

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 mencapai 95,84 Ton.
2. Nilai ekspor hasil perikanan dibanding target daerah dengan capaian kinerja 112,63 , melebihi target yang telah ditetapkan sejak Tahun 2013.



3. Jumlah konsumsi ikan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 106,69 %.

b. Urusan Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 mencapai 6,48 Ton .
2. Nilai kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 7,96 %.

c. Urusan Kehutanan

1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis dibanding dengan luas total hutan dan lahan kritis Tahun 2017 mencapai 0,54 %.
2. Luas kerusakan kawasan hutan dibanding luas kawasan hutan Tahun 2017 mencapai 1,01 %.

d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertambangan tanpa ijin dibanding penanganannya Tahun 2017 mencapai 79,54 %. (seluruh area pertambangan liar langsung ditertibkan).
2. Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, mencapai 46,31 %.

e. Urusan Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan pada 9 Kab/Kota rata-rata mencapai 6.250.712 wisatawan.
2. Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 0,93 %.

f. Urusan Industri

1. Nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,07 %.
2. Jumlah pertumbuhan industri pada 9 Kab/Kota rata-rata mencapai 3,82 %.

g. Urusan Perdagangan

1. Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 5,30 %.
2. Nilai ekspor 2017 dibanding nilai impor 2017 terdapat ekspor bersih perdagangan sebesar 14.249 US\$.

h. Urusan Transmigrasi, dengan;

Urusan Transmigrasi yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 terhadap transmigrasi swakarsa dengan capain kinerja 26,50 %.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017.

Pemerintah memberikan bantuan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian program & kegiatan tugas pembantuan pada SKPD .

Pemerintah memberikan dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kementerian Pertanian
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Kementerian Sosial
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



A. Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

a. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 119.797.925.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 108.052.300.705,- dengan capaian 90,20 %.

b. Dinas Perkebunan

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 7.168.872.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.384.083.950,- dengan capaian 75,10.

c. Dinas Peternakan

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 8.332.948.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.499.807.884,- dengan capaian 90 %.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 848.879.100,- dengan capaian 84,89 %.

e. Dinas Sosial

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 2.701.538.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.542.156.500,- dengan capaian 97,10%.

f. Dinas Perikanan & Kelautan

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4538.231.000,- dengan capaian 97,86 %.

g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Alokasi Anggaran Tugas pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 30.306.511.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.443.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.401.950.871,- dengan capaian 99,91%.

B. Dekonsentrasi

Pemerintah memberikan dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp. 122.682.893.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.688.837.449,- capaian persentase 84,52 %.

a. Sekretariat Daerah

1. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 2 (dua) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Bina Administrasi kewilayahan dengan kegiatan :



- Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah;
- Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran; dan
- Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP dengan kegiatan Pelaksanaan dukungan Perencanaan, Kerja Sama dan Hukum.

2. Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dekonsentrasi

Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 881.831.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 672.498.950,- dengan capaian 88,63 %. Khusus untuk DIPA dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp. 123.076.000,- tidak dilaksanakan karena sampai pada bulan Desember 2017 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tidak ada disampaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program perencanaan pembangunan nasional, pagu Rp. 840.614.000,- , realisasi Rp. 835.803.199,- dengan capaian kinerja 99,43 %.
2. Program Pembangunan Daerah Tertinggal, pagu Rp. 80.000.000,- , realisasi Rp. 79.043.300,- dengan capaian kinerja 98,80 %.

c. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, pagu Rp. 2.305.200,- , realisasi Rp. 2.227.417.450,- dengan capaian kinerja 96,63 %.
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, pagu Rp. 964.259.000,- , realisasi Rp. 920.480.800,- dengan capaian kinerja 95,46 %.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, pagu Rp. 10.229.220.000,- , realisasi Rp. 7.973.521.905,- dengan capaian kinerja 77,95 %.
4. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, pagu Rp. 6.552.390.000,- , realisasi Rp. 5.855.388.838,- dengan capaian 89,36 %.
5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, pagu Rp. 5.239.697.000,- , realisasi Rp. 4.417.859.900,- dengan capaian 84,32 %.

d. Dinas Perkebunan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 707.535.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 610.173.250,- dengan capaian 86,24 %.



e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, pagu Rp. 1.960.000.000,- , realisasi Rp. 1.879.634.600,- dengan capaian kinerja 95,90 %.
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, pagu Rp. 2.270.653.000,- , realisasi Rp. 2.256.091.768,- dengan capaian kinerja 99,36 %.
3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, pagu Rp. 2.127.962.000,- , realisasi Rp. 2.066.098.000,- dengan capaian kinerja 97,09 %.
4. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, pagu Rp. 1.059.490.000,- , realisasi Rp. 911.204.640,- dengan capaian kinerja 86,00 %.

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pagu Rp. 435.227.000,- , realisasi Rp. 371.900.500,- dengan capaian kinerja 85,45 %.
2. Program Pendidikan Dasar dan Menengah, pagu Rp. 5.623.145.000,- , realisasi Rp. 5.201.977.996,- dengan capaian kinerja 92,51 %.
3. Program Guru dan Tenaga Kependidikan, pagu Rp. 1.412.332.000,- , realisasi Rp. 1.373.112.150,- dengan capaian kinerja 97,22 %.
4. Program Pelestarian Budaya, pagu Rp. 324.500.000,- , realisasi Rp. 324.500.000,- dengan capaian kinerja 99,11 %.

g. Dinas Kesehatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, pagu Rp. 1.521.463.000,- , realisasi Rp. 1.416.058.559,- dengan capaian kinerja 93,07 %.
2. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, pagu Rp. 11.589.313.000,- , realisasi Rp. 11.035.363.852,- dengan capaian kinerja 95,22 %.
3. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, pagu Rp. 2.287.873.000,- , realisasi Rp. 1.897.042.829,- dengan capaian kinerja 82,92 %.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pagu Rp. 5.458.438.000,- , realisasi Rp. 812.595.865,- dengan capaian kinerja 87,62 %.
5. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pagu Rp. 834.090.000,- , realisasi Rp. 812.595.865,- dengan capaian kinerja 97,42 %.
6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), pagu Rp. 3.094.828.000,- , realisasi Rp. 2.369.307.175,- dengan capaian kinerja 76,56 %.

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pagu Rp. 606.701.000,- , realisasi Rp. 592.275.914,- dengan capaian kinerja 97,62 %.
2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu Rp. 929.313.000,- , realisasi Rp. 888.893.000,- dengan capaian kinerja 95,65 %.
3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, pagu Rp. 4.191.195.000,- , realisasi Rp. 4.175.317.700,- dengan capaian kinerja 99,62 %.



i. Dinas Sosial

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, pagu Rp. 238.130.000,- , realisasi Rp. 201.622.600,- dengan capaian kinerja 84,67 %.
2. Program Pemberdayaan Sosial, pagu Rp. 2.267.728.000,- , realisasi Rp. 2.160.700.100,- dengan capaian kinerja 95,28 %.
3. Program Rehabilitasi Sosial, pagu Rp. 2.455.268.000,- , realisasi Rp. 2.251.807.000,- dengan capaian kinerja 91,71 %.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pagu Rp. 4.593.078.000,- , realisasi Rp. 4.460.368.966,- dengan capaian kinerja 97,11 %.
5. Program Penanganan Fakir Miskin, pagu Rp. 2.892.845.000,- , realisasi Rp. 2.824.064.500,- dengan capaian kinerja 97,62 %.

j. Dinas Kehutanan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 795.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 744.682.160,- dengan capaian 93,62 %.

k. Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 544.577.648,- dengan capaian 99,01 %.

l. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP, pagu Rp. 608.719.000,- , realisasi Rp. 599.716.000,- dengan capaian kinerja 98,52 %.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pagu Rp. 469.003.000,- , realisasi Rp. 468.893.000,- dengan capaian kinerja 99,98 %.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, pagu Rp. 584.115.000,- , realisasi Rp. 574.419.600,- dengan capaian kinerja 98,34 %.
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pagu Rp. 346.678.000,- , realisasi Rp. 346.678.000,- dengan capaian kinerja 100 %.
5. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, pagu Rp. 198.850.000,- , realisasi Rp. 198.686.500,- dengan capaian kinerja 99,92 %.
6. Program Pengelolaan Ruang Laut, pagu Rp. 167.032.000,- , realisasi Rp. 166.641.730,- dengan capaian kinerja 99,77 %.

m. Dinas Pariwisata

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 1.357.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.356.147.608,- dengan capaian 85,34 %.

n. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 2.220.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.205.057.819,- dengan capaian 99,33 %.



o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Program Pengembangan Perpustakaan, pagu Rp. 1.287.013.000,- , realisasi Rp. 1.201.910.811,- dengan capaian kinerja 93,39 %.
2. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, pagu Rp. 307.286.000,- , realisasi Rp. 272.178.950,- dengan capaian kinerja 88,58 %.

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 266.252.736,- dengan capaian 88,75 %.

q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 23.053.055.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.956.325.202,- dengan capaian 56,20 %.

r. Dinas Pemuda dan Olahraga

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima sebesar Rp. 3.113.389.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.871.275.149,- dengan capaian 92,22 %.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Kerjasama antar pemerintah/daerah.
- b. Kerjasama daerah dengan non pemerintah.
- c. Pembinaan batas wilayah.
- d. Pencegahan dan pengelolaan bencana.
- e. Pengelolaan kawasan khusus.
- f. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat melalui akselerasi ilmu dan teknologi, pemberdayaan potensi daerah dan melengkapi kebutuhan pembangunan dalam berbagai bidang, untuk itu Kalimantan Timur pada tahun 2017 melakukan 19 perjanjian kerjasama antar daerah.

B. Kerja Sama Daerah dengan non pemerintah/pihak ketiga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan kerjasama daerah dengan non pemerintah dalam kerangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah terkait dengan pengelolaan potensi daerah dalam mengungkit nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik, Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur melakukan 20 kerjasama dengan non pemerintah/pihak ketiga.



C. Pembinaan batas wilayah.

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa. Masing-masing 3 Kota dan 7 Kabupaten tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Sampai dengan akhir tahun 2017 panjang batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah sebagai berikut :

- Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur panjang batas \pm 2.198,91 Km, telah disepakati sepanjang \pm 1.325,69 Km atau sebesar 60,29 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang \pm 873,22 Km atau sebesar 39,71 %.
- Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang \pm 1.803,72 Km, telah sepakat \pm 1216,76 Km atau sebesar 67,46 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang \pm 586,96 Km atau sebesar 32,54 %.

Sampai dengan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur masih menyisakan 6 (enam) Segmen batas daerah yang belum selesai dengan Provinsi lain yaitu segmen batas antara :

- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju;
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Barito Utara;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya;
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru.

Untuk batas Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2017 khususnya pada segmen antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya telah tercapai kesepakatan batas \pm 229,29 Km dan masih menyisakan \pm 205,06 Km panjang batas yang belum sepakat.

Sepanjang tahun 2017 telah dilakukan kegiatan survey dan pelacakan batas daerah pada segmen batas antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu segmen batas antara :

- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda;
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat;
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim – Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalteng.



Disamping itu pada tahun 2017 telah dicapai kesepakatan batas secara kartometrik antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Mahakam Ulu;
- Kabupaten Berau – Kabupaten Kutai Timur;
- Titik Pertigaan antara Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk batas daerah antara Kabupaten/Kota masih menyisakan 8 (delapan) segmen batas wilayah yang belum selesai, yaitu :

- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda dengan panjang batas 17,69 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat dengan panjang batas 148,83 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Paser dengan panjang batas 62,21 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang batas 76,10 Km yang belum sepakat;
- Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang batas 30,82 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang batas 83,13 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang batas 372,68 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu dengan panjang batas 81,76 Km yang belum sepakat.

D. Pencegahan dan Pengelolaan Bencana

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus lokal (terjadi di Kabupaten/Kota pada tahun 2017 tidak ada pernyataan Bupati/Walikota), bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat diatasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM. Selama tahun 2017 telah terjadi sebanyak 371 kejadian bencana berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017 telah terjadi 371 kejadian yaitu kebakaran pemukiman, hutan dan lahan (181), angin puting beliung (11), banjir (85), tanah longsor (35), Kecelakaan Transportasi Lintas, Udara, Laut, Sungai (11), lain-lain (48).

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 bahwa Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi daratan seluas kurang lebih 12.734.691,75 Ha, dengan luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 16.732.065,18 Ha.

Pertumbuhan Kaltim Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan menetapkan 8 Kawasan 8 kawasan unggulan Kalimantan Timur :

1. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kawasan Industri Perdagangan dan jasa di Kota Samarinda



3. Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Kota Bontang
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur
5. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau.
6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
8. Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketertiban dan keamanan di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Presentase penyelenggaraan trantibum tahun 2017 sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Pengamanan Aset sebanyak 21 kali.
 2. Pelaksanaan pengaman unjuk rasa sebanyak 21 kali, pengaman unjuk rasa hanya dilakukan di Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
 3. Melaksanakan pengamanan Protoker, Pejabat VVIP dan VIP sebanyak 34 kali, pelaksanaan pengamanan pejabat tergantung jadwal kegiatan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Inventarisasi Perda, Perkada dan PPNS 2 kali untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi Perda, Perkada dan PPNS belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan Nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 50 Tahun 2014 baru terbentuk menjadi bidang tersendiri dan berlaku efektif pada tahun 2016.
- b. Persentase Kegiatan pengaturan, pengawalan dan penjagaan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan operasional patrol wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sebanyak 289 kali.
 - 2) Melaksanakan Pos Pengaman sebanyak 12 bulan atau 360 hari dalam setahun, ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan penjagaan secara bergantian perregu.

VI. PENUTUP

Pada kesempatan yang baik ini, Saya atas nama Gubernur Kalimantan Timur memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Bupati/Walikota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah bekerjasama didalam mensinkronisasikan visi, misi dan program/kegiatan pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.
2. Kepada Pimpinan SKPD dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur dan ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Mengakhiri ringkasan LPPD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan



Timur yang senantiasa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif serta memberikan saran dan kritik guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

PROF. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK